

Kepemimpinan Publik di Tengah Krisis Kepercayaan Politik di Indonesia Menurut Filsafat Politik Niccolo Machiavelli

Paulus Febri Rabuni^{1*}, FX. Eko Armada Riyanto²

^{1,2} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

[*febriipaulus00@gmail.com](mailto:febriipaulus00@gmail.com)

Alamat: Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: febriipaulus00@gmail.com

Abstract. *This article aims to critically examine the concept of public leadership through the philosophical perspective of Niccolo Machiavelli. The crisis of political trust is one of the main challenges in democratic life in Indonesia. This phenomenon is evident in the declining level of public trust in political institutions, public officials, and policy-making processes that are considered not fully in favor of the people's interests. This article explores Machiavelli's system of ideas about virtù and fortuna and analyzes the role of public leadership amidst the crisis of political trust in Indonesia using a political philosophy approach, specifically the dimensions of leadership ethics, public responsibility, and trust in power. The method used is a library study by examining political philosophy literature, specifically the book Dekolonisasi, as well as articles on leadership, ethics, and public trust. The results of the analysis show that the crisis of political trust is not only caused by institutional factors, but also by weak integrity, transparency, and accountability in leadership practices. Therefore, public leadership based on ethics, moral exemplars, and commitment to the public interest are essential requirements for restoring public trust. Thus, strengthening the ethical dimension in public leadership is a strategic step in strengthening the quality of democracy in Indonesia. The focus of this article is to demonstrate a Machiavellian framework for examining tolerance in the murky world of politics.*

Keywords: Political Philosophy, power, Public Leadership, Niccolo Machiavelli

Abstrak. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis konsep kepemimpinan publik melalui perspektif filsafat Niccolo Machiavelli. Krisis kepercayaan politik merupakan salah satu tantangan utama dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini tampak dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, pejabat publik, serta proses pengambilan kebijakan yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Artikel ini menelusuri sistem gagasan Machiavelli tentang *virtù* dan *fortuna* yang menganalisis peran kepemimpinan publik di tengah krisis kepercayaan politik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan filsafat politik, khususnya pada dimensi etika kepemimpinan, tanggung jawab publik, dan kepercayaan kekuasaan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur filsafat politik, secara khusus buku Dekolonisasi, serta artikel-artikel mengenai kepemimpinan, etika, dan kepercayaan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis kepercayaan politik tidak hanya disebabkan oleh faktor institusional, tetapi juga oleh lemahnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan publik yang berlandaskan etika, keteladanan moral, serta komitmen pada kepentingan umum menjadi syarat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penguatan dimensi etis dalam kepemimpinan publik merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Fokus artikel ini adalah menunjukkan sebuah kerangka berpikir Machiavellian dalam menelaah toleransi di dunia politik yang kabur.

*Corresponding author, febriipaulus00@gmail.com

Kata kunci: Filsafat Politik, kekuasaan, Kepemimpinan Publik, Niccolo Machiavelli

LATAR BELAKANG

Kepercayaan di dalam dunia politik saat ini menjadi sebuah krisis yang banyak dihadapi oleh negara demokrasi (Putra, 2024). Salah satu negara yang sedang mengalami krisis kepercayaan politik adalah Indonesia. Saat ini, kepercayaan di dunia politik semakin menurun. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, pejabat pemerintahan, dan pengambilan kebijakan semakin tampak nyata. Masyarakat saat ini cenderung melihat kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan umum. Kebijakan-kebijakan tersebut lebih berpihak pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Kondisi ini melemahkan pengakuan terhadap kekuasaan dan berdampak pada stabilitas kehidupan demokrasi.

Di negara Indonesia, krisis kepercayaan politik mempengaruhi pengawasan dan birokrasi. Hal ini juga menjadi faktor menurunnya moral, terutama menyangkut integritas, transparansi, dan kepercayaan para pemimpin publik. Lemahnya aspek ini dapat menimbulkan praktik kriminal, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya keteladanan moral. Praktik-praktik ini memperdalam jurang krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Maka dari itu, persoalan kepemimpinan publik menjadi kasus yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, secara khusus melalui terang filsafat politik.

Machiavelli adalah salah satu tokoh filsafat yang relevan dalam menganalisis persoalan politik di dalam suatu negara (Atthahara, 2020). Ia mempunyai pemikiran politik mengenai *virtu* dan *fortuna*. Dua konsep ini memberikan kerangka yang kaya untuk memahami dinamika kepemimpinan politik yang tidak stabil. *Virtu* merujuk pada kemampuan, kecakapan, dan ketegasan seorang pemimpin dalam menghadapi suatu tantangan. *Fortuna* berkaitan dengan faktor keberuntungan atau situasi yang berada di luar kendali manusia. Dalam perspektif Machiavelli, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola relasi antara *virtu* dan *fortuna*.

Pemikiran filsafat politik Machiavelli sering kali dipahami Machiavelli sering kali menimbulkan perdebatan. Pemikirannya sering kali dianggap mengabaikan

aspek moral dalam politik. Jika dikaji secara lebih kritis, konsep filsafat politik Machiavelli dapat membuka ruang refleksi mengenai seorang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak secara efektif dalam situasi politik yang kompleks, tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Dalam konteks krisis kepercayaan politik di Indonesia, filsafat politik Machiavelli dapat digunakan untuk mengkaji dan menelaah kembali makna kepemimpinan yang efektif dan relevan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep kepemimpinan publik melalui perspektif filsafat politik Machiavelli. Konsep ini secara khusus mengkaji krisis kepercayaan publik antara masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Melalui pemaparan di atas, dapat dirumuskan masalah yang dihadapi, yaitu Bagaimana konsep kepemimpinan politik menurut perspektif Machiavelli dalam menghadapi krisis kepercayaan publik di Indonesia? Apa relevansi konsep *virtu* dan *fortuna* dalam krisis kepercayaan publik di Indonesia? Fokus utama kajian ini adalah menelusuri konsep *virtu* dan *fortuna* dalam memahami tantangan krisis kepercayaan publik di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga berupaya menunjukkan sebuah kerangka berpikir filsafat politik menurut Machiavelli untuk mengkaji praktik toleransi dalam dunia politik yang sering kali bersifat ambigu dan "kabur"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis filsafat politik kritis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan reflektif, berkaitan dengan cara pandang Niccolo Machiavelli terhadap kepemimpinan publik di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian filsafat politik, sekaligus menawarkan refleksi praktis bagi upaya memperkuat kualitas kepemimpinan publik di Indonesia. Pada akhirnya, penguatan dimensi etis dalam kepemimpinan publik menjadi langkah strategis yang tidak hanya penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kepercayaan Politik di Indonesia

Krisis kepercayaan publik di Indonesia merupakan fenomena politik yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Bentuk krisis kepercayaan itu berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Darto Wahidin, 2024). Krisis ini membuat masyarakat semakin ragu terhadap proses demokrasi, seperti pemilu, yang dianggap tidak sepenuhnya transparan dan adil. Ketidakpercayaan ini semakin diperkuat dengan maraknya kasus korupsi, politik uang, dan kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Krisis kepercayaan politik selalu merujuk pada lembaga pemerintahan dan jajarannya (Kartika, 2015). Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat semakin ragu terhadap kinerja dan integritas pemerintah. Krisis ini juga tampak dengan meningkatnya apatisme politik. Berbagai dimensi masyarakat, secara khusus kaum muda merasa bahwa partisipasi politik tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya cenderung menurun. Apatisme menjadi indikasi bahwa masyarakat kehilangan harapan terhadap sistem politik yang ada saat ini. Secara logika politik, para pejabat menindas rakyat secara halus (Riyanto, 2025). Bentuk lain dari krisis kepercayaan adalah pesimisme dan sinisme terhadap politik. Politik sering kali dideskripsikan sebagai ruang yang kotor, penuh kelicikan, sarat akan kepentingan pribadi atau kelompok. Pandangan ini diperkuat dengan munculnya kasus korupsi dan skandal politik yang melibatkan pejabat pemerintahan. Dalam situasi ini, masyarakat cenderung melihat bahwa kekuasaan tidak dijalankan untuk kepentingan umum dan diperuntukkan bagi kepentingan kaum elite saja.

Meningkatnya polarisasi sosial menjadi salah satu isu krisis kepercayaan dalam dunia politik. Perbedaan pilihan politik sering kali berkembang menjadi konflik dalam kehidupan masyarakat. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di kalangan kaum elite, tetapi juga sampai pada masyarakat biasa (Santoso, 2023). Hal ini justru mengancam hubungan sosial dan persatuan bangsa ini. Legitimasi pemerintah menjadi sangat lemah, sehingga kebijakan yang diambil sangat rentan terhadap penolakan dari masyarakat. kemudian, krisis ini berpotensi memicu ketidakstabilan

politik dan sosial, serta melemahkan hubungan nasional jika ini terus berlanjut, demokrasi dapat kehilangan substansinya karena kepercayaan kepada lembaga pemerintah semakin buruk.

Konsep *Virtu* dan *Fortuna*

Pemikiran Niccolo Machiavelli memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika kepemimpinan politik dalam situasi yang krisis saat ini. Konsep *virtu* merujuk pada kemampuan seseorang dalam memegang jabatan sebagai seorang pemimpin, seperti cara bertindak yang efektif, tegas, dan mudah beradaptasi dalam setiap situasi (Maiwan, 2019). Dalam konteks ini, *virtu* dapat dipahami sebagai kapasitas seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berani menghadapi tekanan politik dan publik, serta mampu mengelola konflik. *Virtu* memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan. Bagi seorang pemimpin, *virtu* selalu mengedepankan kekuasaan formal dan membangun kepercayaan melalui tindakan nyata pada masyarakat. Oleh karena itu, *virtu* tidak sekadar kemampuan teknis belaka, melainkan mencakup kecakapan moral dan keberanian dalam berpolitik.

Fortuna merujuk pada faktor eksternal yang berada di luar kendali manusia. Faktor tersebut adalah situasi politik, ekonomi, dan dinamika sosial. Dalam konteks krisis kepercayaan ini, *fortuna* dapat berupa opini publik, tekanan global, dan krisis yang tidak terduga. Relasi *virtu* dan *fortuna* menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam memimpin (Atthahara, 2020). Hubungan antara kemampuan pemimpin (*virtu*) dan situasi politik (*fortuna*) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas individu saja, tetapi juga pada kemampuan membaca dan memanfaatkan sebuah peluang. Seorang pemimpin yang gagal dalam memahami dinamika *fortuna* cenderung kehilangan arah, sementara yang mampu mengelolanya akan lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap krisis.

Kepemimpinan Menurut Machiavelli

Filsafat politik Machiavelli dipandang sebagai konsep yang kontroversial, karena dianggap sebagai ruang untuk menempatkan efektivitas politik di atas

moralitas (Nashar Akbar Muhammad, 2021). Dalam beberapa karyanya, ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang secara moral ambigu demi menjaga stabilitas kekuasaan. Hal ini menciptakan situasi yang menegangkan antara moralitas dan efektivitas politik. Dalam konteks kepemimpinan publik, pandangan ini dapat direinterpretasikan secara lebih terstruktur. Etika dalam pemikiran Machiavelli tidak harus dipahami sebagai pengabaian moral, tetapi sebagai upaya untuk menyesuaikan prinsip moral dengan realitas politik yang kompleks. Seorang pemimpin diajak untuk menjadi bijaksana dalam menyeimbangkan antara kepentingan praktis dan nilai-nilai etis.

Reinterpretasi menjadi unsur penting dalam konteks Indonesia saat ini. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas. Seorang pemimpin yang hanya berorientasi pada efektivitas tanpa mempertimbangkan etika akan semakin memperdalam krisis kepercayaan (Romadhon, S., & Subakti, 2022). Sebaliknya, integrasi antara kecakapan politik dan ditanggung oleh moral dapat menjadi dasar bagi setiap pemimpin yang lebih dapat dipercaya. Kepemimpinan dalam politik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Integritas menjadi penopang utama dalam membangun kepercayaan. Pemimpin yang memiliki integritas akan konsisten antara perkataan dan tindakan, serta menjunjung nilai kejujuran dan keadilan

Kemudian, transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting bagi seorang pemimpin politik. Transparansi memberikan masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diambil. Kedua unsur ini membuat kepercayaan publik dapat dibangun dengan baik. Seorang pemimpin politik juga memberikan teladan moral. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Keteladan ini memiliki dampak yang luas, karena dapat membentuk budaya politik yang lebih sehat.

Strategi kepemimpinan dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik

Seorang pemimpin publik dituntut untuk mampu membaca situasi secara cermat dan dapat mengambil keputusan dengan tepat waktu dan adil. Seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dalam membuat kebijakan dan disertai dengan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dapat menciptakan rasa aman dan memberi kepastian di dalam masyarakat. sebaliknya, pemimpin yang lemah dan tidak konsisten akan memperbesar potensi konflik. Seorang pemimpin harus berpikir dan mengelaborasi kesadarannya dengan kepentingan orang lain (Riyanto, 2025). Hal ini juga mempercepat erosi kepercayaan publik. Kemudian, stabilitas seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam membangun kesepakatan bersama. Dalam masyarakat yang plural, perbedaan pandangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Maka, seorang pemimpin harus mampu menjadi mediator yang adil dan bijaksana, sehingga berbagai kepentingan dapat dijaga tanpa menimbulkan konflik.

Kepercayaan publik dapat dipahami sebagai keyakinan masyarakat bahwa pemimpin dan institusi negara bertindak untuk kepentingan umum. Kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui proses yang panjang dan konsisten (Kartika, 2015). Dalam pandangan sosial, kepercayaan merupakan modal penting yang memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika kepercayaan publik tinggi, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, setiap kebijakan akan dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pemerintahan.

Kepercayaan juga berkaitan erat dengan pandangan tentang keadilan. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemimpin yang dianggap adil, jujur, dan konsisten. Membangun kepercayaan publik tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Integritas merupakan tiang utama dalam kepemimpinan publik. Pemimpin yang berintegritas akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakininya, serta konsisten antara ucapan dan tindakan. Keteladanan moral menjadi penting karena masyarakat cenderung menilai pemimpin bukan hanya dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari

perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, pemimpin harus mampu menunjukkan komitmen terhadap kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tindakan kecil sekalipun, seperti keterbukaan dalam penggunaan anggaran atau kesediaan untuk mengakui kesalahan, dapat memberikan dampak besar terhadap pandangan publik.

Pemimpin yang transparan akan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat (Astaman, 2022). Masyarakat dapat dengan jelas memahami alasan di balik sebuah kebijakan. Akuntabilitas memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. Relasi dua unsur ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih handal dan dipercaya. Komunikasi merupakan alat penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, jujur, dan tepat waktu. Komunikasi yang buruk akan menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar potensi konflik.

Di era digital ini, tantangan komunikasi menjadi semakin banyak. Informasi dapat menyebar dengan cepat, termasuk informasi yang tidak akurat. Seorang pemimpin harus proaktif dalam memberikan klarifikasi serta membangun narasi yang positif dan terstruktur. Komunikasi yang efektif juga harus bersifat dua arah. Pemimpin tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, tercipta dialog yang sehat dan partisipatif. Strategi kepemimpinan dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Kepercayaan publik tidak hanya menentukan legitimasi kekuasaan, tetapi juga mempengaruhi efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Pemimpin yang mampu mengintegrasikan integritas, transparansi, komunikasi yang efektif, serta responsivitas akan lebih mampu membangun kepercayaan masyarakat (Damayanti, 2023). Selain itu, penguatan kelembagaan dan penerapan nilai-nilai etika juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang kredibel. Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, stabilitas dan kepercayaan

publik dapat terjaga, sehingga demokrasi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa krisis kepercayaan politik di Indonesia merupakan persoalan serius yang mengancam kualitas demokrasi. Krisis ini tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem kelembagaan, tetapi juga oleh rendahnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik kepemimpinan publik. Ketidakselarasan antara harapan masyarakat dan tindakan para pemimpin semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan, sehingga legitimasi kekuasaan menjadi semakin rapuh. Dalam konteks ini, pemikiran Niccolo Machiavelli, khususnya melalui konsep *virtu* dan *fortuna*, memberikan kerangka reflektif yang relevan untuk memahami dinamika kepemimpinan publik. *Virtu* menekankan pentingnya kapasitas, keberanian, dan kecakapan pemimpin dalam menghadapi tantangan politik, sementara *fortuna* menunjukkan bahwa situasi eksternal yang tidak terduga juga turut memengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Relasi dialektis antara keduanya menuntut pemimpin untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan.

Reinterpretasi etika dalam perspektif Machiavellian menunjukkan bahwa efektivitas politik tidak harus bertentangan dengan moralitas. Sebaliknya, kepemimpinan publik yang ideal justru harus mampu mengintegrasikan kecakapan strategis dengan tanggung jawab moral. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, toleransi politik yang dikelola secara bijaksana juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial di tengah pluralitas. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan dimensi etis dalam kepemimpinan publik merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Kepemimpinan yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermoral, akan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan umum.

DAFTAR REFERENSI

- Astaman, M. (2022). *Pancasila dan Generasi Muda*. STFT Widya Sasana.
<https://www.youtube.com/watch?v=sbHa7AWQx34>
- Atthahara, H. (2020). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 85–100.
- Damayanti, C. (2023). Kehidupan Politik dalam Society 5.0: Dilema dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesenjangan. *Gita Sang Surya*, 18(1), 33–46.
- Darto Wahidin, A. C. M. (2024). Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(3), 885–904.
- Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. *Widya Accarya*, 4(1).
- Maiwan, M. (2019). Antara Virtue Dan Fortune: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(1), 39–61.
- Nashar Akbar Muhammad, R. Y. A. H. (2021). Kejujuran dan etika dalam konsep politik Machiavelli. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 57–73.
- Putra, E. (2024). Representasi politik dan marginalisasi sosial di perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 14(1), 20–37.
- Riyanto, F. E. A. (2025). *Apakah Berpikir: Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)* (1st ed.). Penerbit Obor.
- _____. (2025). *Dekolonisasi: Filsafat-Metodologis Kesadaran Tentang Liyan, kekuasaan, dan Societas "Kita"*. Kanisius.
- Romadhon, S., & Subakti, T. (2022). Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(2), 91–115.
- Santoso, B. (2023). Gerakan sosial akar rumput dan solidaritas komunitas urban. *Jurnal Gerakan Sosial*, 7(2), 55–70.